

# KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DISTRIK SUGAPA KABUPATEN INTAN JAYA<sup>1</sup>

Oleh: YOHANES .H. BELAU<sup>2</sup>

## ABSTRAK

*Masyarakat miskin merupakan permasalahan yang ada disetiap wilayah. Hal ini menjadi masalah tidak hanya bagi pemerintahan daerah, nasional, bahkan menjadi masalah internasional. Kebijakan pemerintah dalam menangani masalah ini merupakan sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan. Berkaitan dengan itu ketersediaan data sebagai bahan dalam menyusun kebijakan sangat dibutuhkan, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang perlu diperhatikan dalam pembuatan kebijakan. Untuk itu penelitian tentang pemberdayaan masyarakat ini menjadi penting, khususnya yang terkait dengan kebijakan pemerintah.*

*Metode yang di pergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat khususnya di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.*

*Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan data bahwa sejak berlakunya keputusan pemerintah dalam musyawarah rencana pembangunan kampung (**MUSREMBANG**) dalam kebijakan pemberdayaan masyarakat terbukti dapat menurunkan angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Intan Jaya, walaupun harus diakui seutuhnya penurunan angka kemiskinan tidak hanya karena adanya program pemberdayaan.*

**Kata Kunci : kebijakan pemerintah, pemberdayaan masyarakat.**

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

UU NO. 21 Tahun 2001, tentang “Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua” sangat memberi peluang yang luas bagi pemerintah daerah untuk menjalankan serta mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan letak geografis dan kebutuhan kondisi masyarakat daerahnya masing-masing dalam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Salah satu yang perlu pemerintah daerah upayakan yaitu pemberdayaan masyarakat miskin. Keberadaan masyarakat miskin dalam kenyataannya masih banyak terdapat diseluruh wilayah Indonesia. Demikian juga yang terjadi di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya dimana masih banyak masyarakat yang tergolong miskin, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting untuk dapat memberdayakan mereka.

Secara umum factor yang menjadi penyebab masyarakat menjadi miskin diwilayah ini antara lain: belum adanya Infrastruktur jalan, minimnya lapangan pekerjaan, minimnya daya dukung sector ekonomi, serta kurangnya sarana-prasarana sosial lainnya seperti sekolah-sekolah, rumah sakit, bandar udara, pasar, dan lain-lain. Oleh sebab itu upaya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah meningkatkan faktor-faktor tersebut agar supaya keberdayaan masyarakat dapat terwujud.

---

<sup>1</sup> Merupakan skripsi penulis

<sup>2</sup> Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNSRAT

Ironisnya kebijakan yang dibuat dan dijalankan oleh pemerintah saat ini khususnya yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat miskin di wilayah ini dirasakan masih belum baik. Akibatnya berbagai kebijakan tersebut belum menjadi solusi bagi pengentasan kemiskinan di daerah ini. Melihat fakta tersebut dirasa sangat perlu untuk dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi factor-faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menangani masalah kemiskinan di wilayah ini.

### **Perumusan Masalah.**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Apa yang Menyebabkan Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat masih kurang baik?

### **Tujuan Penelitian.**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang menyebabkan kebijakan pemerintah masih kurang maksimal dalam pemberdayaan masyarakat miskin di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

### **Manfaat Penelitian.**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya. Dan juga secara ilmiah penelitian ini diharapkan guna dapat memberikan kontribusi sangat positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang khusus ilmu social yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Kebijakan.**

Pemikiran dasar sebuah kebijakan pemerintah (publik policy) selalu diawali dari pemikiran tentang penyusunan atau perumusan, implementasi atau pelaksanaan, evaluasi, hingga akhirnya adalah penilaian. Semuanya itu memerlukan berbagai pemikiran yang rasional dan objektif sehingga menciptakan keadilan dan bermartabat, tentunya akan memberikan manfaat yang besar terhadap kehidupan bagi masyarakat umumnya dan lebih khusus bagi masyarakat itu sendiri. Kebijakan dapat disesuaikan dengan apa yang ingin dilakukan sangat beragam terkait dengan bidang keahlian dan tergantung pada konteks apa yang hendak digunakan.

Menurut Drucker (1978:44) efektifitas atau kebijakan adalah sesuatu tingkatan yang sesuai antara keluaran secara empiris dalam suatu system dan keluaran yang diharapkan. Sementara itu, Menurut Bernard (Dalam Gybson 1997:56), kebijakan adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama dimana derajat pencapaian menunjukkan derajat pemberdayaan. Kebijakan dapat digunakan sebagai suatu alat evaluasi efektif atau tindakannya, Menurut Zulkadi (dalam Wahyuningsih 2005:22) yang dapat dilihat dari, kemampuan memecahkan masalah, keefektifan, tindakan, dapat diukur dari kemampuannya dalam memecahkan persoalan atau permasalahan yang dihadapi sebelum dan sesudah tindakan itu tersebut dilaksanakan seberapa besar mengatasi persoalan. Menurut Drabkin (dalam Wahyuningsi 2005:22) kebijakan merupakan suatu hasil analisis yang mendalam terhadap berbagai alternatif yang bermuara kepada keputusan tentang alternatif terbaik. Menurut William N. Dunn (1994; 34) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah sesuatu langkah pilihan-pilihan saling berhubungan yang di buat oleh lembaga atau pejabat pemerintah atau bidang-bidang yang menyangkut tugas pemerintahan. Kebijakan publik adalah jalan mencapai tujuan bersama yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Kesatuan

Republik Indonesia berdasarkan hukum dan tidak semata-mata kekuasaan. Berdasarkan beberapa definisi diatas tentang kebijakan, maka penulis dapat simpulkan bahwa “kebijakan publik sebagai salah satu manajemen yang dapat dipergunakan untuk mencapai cita-cita bangsa dan tujuan Nasional.

## **B. Konsep Pemberdayaan.**

Secara etimologis pemberdayaan berdasar dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya, kekuatan, ataupun kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. Pengertian “proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistimatis yang mencerminkan pada pentahapan upaya pengubahan masyarakat kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang dilakukan secara pentahapan untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah pada Knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-prilaku sadar kecakapan-keterampilan yang baik. Makna “memperoleh” daya, kemampuan, atau kekuatan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan untuk meningkatkan daya, kekuatan dan kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri mencari, mengusahakan, menciptakan situasi, atau meminta kepada pihak lain, untuk memberikan daya atau kekuatan serta kemampuan. Makna kata “pemberian” menunjuk bahwa inisiatif bukan dari masyarakat. inisiatif untuk mengalihkan daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak-pihak yang lain yang memiliki kekuatan atau kemampuan misalnya pemerintah kepada masyarakat miskin.

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Fokus Penelitian.**

Untuk memahami tentang kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat miskin yang terjadi di lapangan, maka penelitian ini akan difokuskan ke masyarakat yang kurang atau tidak mampu di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya.

### **B. Jenis Penelitian.**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dimana data yang diperoleh melalui sumber data, akan dianalisis dan dideskripsikan. Deskriptif adalah suatu usaha untuk menggambarkan atau melukiskan fakta-fakta yang ada, dan tertuju pada usaha untuk mengemukakan secara lengkap aspek yang di selidiki agar jelas keadaan dan kondisinya.

### **C. Sumber Data.**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. : (1) Data primer dan (2) Data sekunder. Data primer diperoleh dalam bentuk verbal atau kata-kata atau ucapan lisan dan perilaku dari subjek (informan) yang berkaitan dengan objek penelitian.

Data sekunder yaitu berupa tulisan-tulisan, rekaman-rekaman, gambar-gambar atau foto-foto, peta, grafik yang semuanya berhubungan dengan objek penelitian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari informan dan dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto, grafik, tabel, model, catatan rapat, arsip-arsip atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian.

Pemilihan informan dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* digunakan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian

informan yang menguasai permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data.

#### **D. Metode Pengumpulan Data.**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dengan Metode ini penulis bekerja secara objektif dan sistematis untuk mendiskripsikan isi bahan melalui pendekatan kualitatif.

Dalam penelitian ini pula akan melakukan beberapa teknik pengumpulan data antara lain:

##### **1. Observasi.**

Dengan menggunakan metode ini penulis mengamati tentang kebijakan pemerintah terhadap penanganan pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan, yang terjadi di Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya masyarakat miskin secara langsung .

##### **2. Wawancara.**

Menurut Sutrisno (1989:96) Dalam bukunya Berjudul Metodologi Penelitian, Wawancara dapat didefinisikan adalah suatu percakapan yang diarahkan pada masalah tertentu, merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua atau lebih yang berhadapan-hadapan secara fisik. Dari wawancara tersebut peneliti diharapkan memperoleh informasi lebih akurat.

#### **E. Teknik Analisa Data.**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisa data yang berifat deskriptif kualitatif, dimana suatu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas fakta-fakta berdasarkan data yang terkumpul di lapangan yang berkaitan erat dengan objek penelitian, kemudian data tersebut dipadukan dan dianalisa secara kualitatif dengan memberikan gambaran-gambaran, interpretasi atau penafsiran atau fakta-fakta tersebut.

Menurut Nawawi, penelitian deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya (1994:73).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisa data yang ada adalah sebagai berikut :

- a. Kategorisasi, dalam hal ini data-data yang diperoleh dari lapangan di kategorisasikan berdasarkan data prioritas yang dianalisa dan data yang tidak diprioritaskan untuk dianalisa.
- b. Reduksi, adalah sebuah langkah dengan menghilangkan atau menegasikan data tertentu yang dinilai tidak perlu untuk dianalisa secara lebih lanjut untuk kepentingan penelitian.

Interpretasi, adalah tahapan akhir dari proses analisa data, dimana pada tahap ini penulis memberikan tafsiran dan penjelasan-penjelasan yang berkaitan erat dengan data-data yang menjadi isu dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil.**

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bupati dan anggota DPRD) pernah mengadakan Kegiatan “Musyawarah Rencana Pembangunan” (**MUSRENBANG**) dengan menghadirkan perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan antara lain: Kepala Distrik, Kepala Kampung, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kaum Wanita, (Se-Kabupaten) untuk mengambil keputusan bersama. Dengan adanya MUSRENBANG ini telah ditetapkan hasil salah satunya yaitu itu “**Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin**” akan tetapi yang mengelola dan menjalankan ini adalah setiap Pemerintah Distrik masing-masing karena mereka sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sebagai Administrator

Menurut pendapat (Makmur 2011:11-12) mengatakan, bahwa: Konsep yang berkaitan dengan kebijakan ada empat bentuk yang sangat luas maknanya akan tetapi dari empat konsep ini penulis akan mengambil salah satu yaitu: Konsep Kebijakan Logika dan realitas, yang diperuntukan bagi pihak publik maupun pihak swasta dan bisa menjadi ukuran dalam rangka menciptakan tingkat kepatuhan bagi masyarakat terkait pada pelaksanaan kebijakan. Yang dimaksud dengan **logika** adalah suatu konsep yang menggambarkan penggabungan dari berbagai pertimbangan menjadi sesuatu keseluruhan yang lebih kompleks namun membentuk suatu kesatuan dalam keutuhan, kemudian akan memberikan pemahaman yang tunggal sehingga tidak mengandung penggabungan makna atau pengertian isi dari suatu kebijakn. Ketidaktepatan merumuskan konsep logika kebijakan akan memberikan pemaknaan ganda dan akan keluar dari pemahaman konsep-konsep kebijakan logika. Sedangkan yang dimaksud dengan konsep **realita** dalam kebijakan adalah konsep realitas yang menghubungkan suatu kenyataan fenomena sosial atau lingkungan yang satu dengan kenyataan fenomena sosial dan lingkungan yang lainnya sehingga dapat memperkuat maupun memperlemah sesuatu kebijakan. Kegunaan dan pemanfaatan suatu bentuk kebijakan dalam kehidupan manusia apabila konsep ini senantiasa dihubungkan dalam merumuskan suatu bentuk kebijakan.

Pemerintah Distrik Sugapa hanya menjalankan tugas apa yang sudah dipercayakan atau sudah diprogramkan dari tingkat atas yaitu Bupati dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sehingga pemerintah distrik tidak bisa membuat kebijakan sendiri untuk pemberdayaan masyarakat akan tetap hanya sebagai menjalankan bentuk layanan fisik maupun nonfisiknya serta apa yang sudah menjadi program bagi instansinya di distrik. Oleh karena itu pemerintah distrik melakukan tindakan-tindakan didalam, baik untuk internal birokrasi maupun masyarakat publik. Pemerintah berperan dalam pemberdayaan masyarakat berarti tidak terlepas dari pada tindakan-tindakan, atau peranan- peranan atau cara-cara atau juga proses kerja dari pemerintah Distrik Sugapa yang telah dilakukan.

Menurut informan **T.D** salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) umur 37 tahun jenjang Pendidikan Sarjana (S1) sudah menikah, mengatakan, bahwa: sejak berlakukannya Keputusan untuk memprogramkan dana pemberdayaan masyarakat miskin ini, di tahun 2012 tahun 2013 dirasakan cukup membantu masyarakat yang ada di Kabupaten Intan Jaya Distrik Sugapa, hal ini dapat dibuktikan dengan menurunnya angka kemiskinan yang ada di kabupaten Intan Jaya, walaupun harus tidak diakui seutuhnya penurunan angka kemiskinan karena adanya dana pemberdayaan, namun setidaknya dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan mereka. Selain itu juga interes kami legislatif selalu mengalami kesulitan yang begitu rumit dalam melakukan tugas pengawasan dan kontroling dari legislatif terhadap program ini, serta karena medan daerah yang menjulang tinggi dan belum adanya transportasi untuk mendukung tugas pengawasan. Disamping itu juga para anggota dewan yang ada berbeda pemahaman sesuai dengan latarbelakang pendidikan yang dimiliki. Seperti yang diketahui latar belakang anggota dewan di sini bervariasi, ada yang tamatan SMP, SMA dan Sarjana. Kami punya keinginan agar masyarakat semua sejatera namun banyak kendala yang menghambat para masyarakat dan kami pemerintah dalam mewujudkan niat tersebut.

Hal senada diungkapkan oleh Informan **M.B** salah satu Tokoh Lembaga Adat umur 55 tahun pekerjaan swasta jenjang pendidikan SLTA. Ketika di wawancara dia mengatakan: *"Ya, saya melihat kebijakan yang dibuat pemerintah saat ini cukup tepat karena sesuai dengan apa yang dilakukan pemerintah, namun untuk merubah kondisi daerah ke arah yang membangun atau berkembang itu sangat sulit karena penyediaan sarana-prasarana belum memadai."* Dia juga mengatakan bahwa bukan dana yang jadi permasalahan. Karena menurutnya dengan dana yang besar masyarakat tidak akan mandiri sampai kapan pun karena dimanjakan, justru yang mesti disediakan pemerintah adalah sarana-sarana yang mendukung usaha-usaha masyarakat.

Menurut informan **M.S**, umur 29 tahun, Ketua Orang Muda Katolik (OMK) jenjang pendidikan Sarjana (S1)), mengatakan bahwa selama ini dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu masyarakat sebenarnya sudah cukup, namun kebijakan tersebut menurutnya kurang tepat, karena jika masyarakat diberi uang tunai maka itu akan cepat habis dan efeknya kurang baik bagi pemberdayaan masyarakat. Menurutnya pemerintah seharusnya menyediakan sarana-sarana pendukung lainnya seperti: Jalan, Air Bersih, Penerangan, Pemukiman, Pasar, Jempatan, Kesehatan, pendidikan, Transportasi, dan bukan memberikan uang.

Menurut Informan **P.S** Sebagai salah satu Tokoh adat dan tokoh pemuda Kampung Yogkatapa Distrik Sugapa, mengatakan bantuan dana pemberdayaan dari pemerintah Kabupaten Intan Jaya cukup membantu masyarakat akan tetapi kurang dilakukan evaluasi dan kontroling langsung dari pemerintah Kabupaten dan pemerintah distrik sehingga banyak masyarakat salah menggunakan dana yang sudah diberikan. Fakta tersebut menurutnya justru merupakan faktor penghambat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Seharusnya dana yang diperoleh harus diolah untuk mendapatkan dana yang lebih besar.

Menurut informan **Y.D** sebagai Kepala Distrik umur 48 jenjang pendidikan teakhir Sarjana (S1) bertempat tinggal di kampung Yogkatapa Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya sebagai pengerak, pembimbing dan pengarah masyarakat Distrik Sugapa, mengatakan: *"Ya, kami sebagai pemerintah Tingkat bawah dari Pemerintah Kabupaten sudah tetapkan Program yang merupakan tindak lanjut dari program pemberdayaan masyarakat miskin, dana sudah kami salurkan ke setiap Kampung atau desa yang ada di Distrik Sugapa ini untuk mensejahterakan masyarakat miskin. Dana yang diberikan pada setiap keluarga yang ada dan terlebih khusus lagi bagi keluarga yang kami bantu dalam dana pemberdayaan ini tujuannya yaitu, agar mereka bias mengembangkan usaha-usaha yang mereka lakukan antara lain dibidang pertanian, perikanan, perdagangan, dan lain-lain. Dana bantuan yang diberikan tersebut diharapkan bisa membantu kebutuhan tambahan bukan untuk terpakai habis. Namun kalau terpakai habis itu adalah salahnya sendiri. Kami hanya siap naikkan laporan ke atasan sebagai barang bukti. Akan tetapi bagi keluarga yang sudah ada usaha dari dana ini, pemerintah Kabupaten telah bentuk tim untuk pemeriksaan dalam penggunaan dana ini untuk semua kampung yang ada di distrik Sugapa. Oleh karena itu kami pemerintah distrik juga sudah bentuk Tim agar bekerja bersama untuk pengecekan bagi masyarakat yang sudah ada hasil yang baik dan tidak, maka kami pemerintah distrik akan kerja sama dengan pemerintah kabupaten untuk memberi penghargaan berupa bantuan bahan makananan dan dana satu persen untuk nantinya. Hal ini yang kami lakukan adalah agar supaya memberikan semangat kepada masyarakat yang sudah sukses, dan memberikan motifasi bagi masyarakat yang salah gunakan dana agar mereka punya semangat yang baru juga untuk berusaha. Oleh karna itu kami pemerintah Distrik Sudah bentuk Tim sendiri juga. Akan tetapi dalam kinerja kami di distrik ada staf saya juga yang tidak mampu dalam pekerjann atau tugas yang dipercayakan karena pendidikannya rendah hal ini mempengaruhi pada kenerja yang ada di distrik ini sehingga saya akan upayakan bagi staf saya untuk kursus-kursus tertentu yang bisa melengkapi apa yang belum bisa dapat dikerjakan."*

Menurut Informan Ibu **E.S** umur 48 sebagai penerima bantuan ketika diwawancara mengatakan bahwa dirinya senang karena dapat bantuan dana pemberdayaan. Dirinya selama ini mengalami kesulitan yang luar biasa dalam pembiayaan pendidikan anak. Dengan adanya bantuan dana pemberdayaan masyarakat miskin yang diberikan pemerintah terasa sangat membantu.

Menurut informan **F.N** salah satu Ibu Rumah Tangga (IRT) umur 30 tahun yang bertempat tinggal di Kampung Bilogai Distrik Sugapa Kabupaten Intan Jaya, mengaku sangat senang dengan pemberian dana pemberdayaan masyarakat miskin dari pemerintah. Dia mengaku dana yang diperoleh dipakai sebagai dana tambahan modal bagi usaha yang sudah dijalankannya selama ini. Dan dia juga mengaku dengan adanya tambahan modal tersebut keuntungannya semakin bertambah dalam usahanya.

## **B. Pembahasan.**

Pemerintah Kampung/Desa, Distrik/Kacamatan, Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Bupati dan anggota DPRD) pernah mengadakan kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Tingkat Kampung, Distrik dan Kabupaten” (**MUSREMBANG**) dengan menghadirkan berbagai perwakilan orang-orang dari berbagai kalangan antara lain: Kepala Kampung, Kepala Distrik, Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Kaum Wanita, (Se-Kabupaten) untuk mengambil keputusan bersama. Adanya MUSREMBANG ini telah ditetapkan hasil salah satunya yaitu itu **”Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin”**.

Setelah tahapan musrembang diatas dilaksanakan, maka program-program tersebut dimasukan dalam Rancangan Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimana semua kegiatan dari instansi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dipandu Sekertaris Daerah (SEKDA). Akan tetapi yang mengelola dan menjalankan program ini adalah masing-masing instansi dan Pemerintah Distrik. Karena Kepala Distrik sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah kabupaten sebagai Administrator maka semua kegiatan kerja dilakukan dalam instansinya akan di laporkan ke atasan berupa Laporan Pertanggung Jawaban Kerja Tahunan (LPJKT) yang akan dilaporkan ke atasan Melalui Sekertaris Daerah (SEKDA), agar Bupati dan DPRD dapat tahu dari laporan tersebut.

Pemerintah Distrik Sugapa hanya menjalankan tugas apa yang sudah diprogramkan dari tingkat atas yaitu Bupati, Sekertaris Daerah dan para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sehingga pemerintah distrik tidak bisa membuat kebijakan untuk pemberdayaan masyarakat sendiri. Hal ini merupakan salah satu kendala juga dalam memaksimalkan program pemberdayaan masyarakat.

## **Fakto-faktor Penghambat yang mempengaruhi Kebijakan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat.**

### **a. Faktor Internal.**

Tidak transparannya pihak pemerintah baik dari pihak legislative maupun legislative merupakan kendala utama dalam program pemberdayaan masyarakat. Besaran dana yang akan dikucurkan tidak pernah transparan diungkapkan besarnya. Selain itu juga pemerintah kurang memfasilitasi masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka atau mengelola uang bantuan yang diberikan. Karena yang ada di benak mereka hanya dengan memberikan bantuan dana persoalan pemberdayaan dapat dilakukan.

Factor lain yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan modal yang paling pokok untuk menentukan hasil dalam suatu kinerja. Namun yang menjadi kendala sebagian besar anggota DPRD memiliki latar belakang pendidikan yang kurang baik. Sehingga sangat sukar diharapkan mereka dapat maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan.

Factor lain juga yang turut mempengaruhi dari sisi internal adalah budaya yang berkembang ditengah masyarakat. Budaya yang sangat menghormati atasan yang berkembang di masyarakat telah membuat masyarakat enggan untuk melakukan kritik terhadap pemerintah atau atasan mereka, walaupun mereka sudah tahu bahwa kebijakan yang dibuat kurang mengenakan buat mereka.

Selain itu banyak dari fakta yang ditemui didalam penelitian ternyata masih banyak aparatur yang hanya datang ke kantor pada saat tanggal terima gaji saja. Hal itu disebabkan karena wilayah ini memang terletak sangat terpencil. Sehingga banyak aparatur birokrasi yang hanya hadir dikantor kurang dari jam bertugas dari semestinya. Hal ini mengakibatkan pelayanan public kurang maksimal.

Keberadaan masyarakat juga sangat mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Keterlibatan masyarakat jelas sangat mempengaruhi program pemberdayaan masyarakat karena keinginan untuk berdaya itu harus ada dalam masyarakat itu

sendiri. Jika masyarakat sendiri yang akan diberdayakan ternyata tidak punya keinginan untuk diberdayakan jelas akan sulit.

#### **b. Faktor Eksternal.**

Transportasi merupakan factor penting dalam mengembangkan sebuah wilayah. Wilayah Distrik Sugapa sangat minim dalam hal transportasi. Sehingga untk mengangkut bahan-bahan bangunan menghadapi kesulitan sebagai akibat dari factor transportasi ini. Akibat minimnya transportasi tersebut sangat berdampak pada harga. Bahan pokok menjadi mahal sehingga mengakibatkan biaya hidup menjadi tinggi. Hal ini semakin membuat banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Belum adanya infrakstrustur yang baik pada prinsipnya juga mengakibatkan banyak masyarakat yang punya keinginan untuk berusaha namun akibat minimnya infrastruktur yang ada membuat mereka tidak bisa dapat menjual dan memasarkan dagangan mereka. Hal tersebut diperparah dengan belum adanya penerangan listrik. Padahal listrik merupakan kebutuhan yang paling penting bagi suatu daerah. Bagi masyarakat Kabupaten Intan Jaya Distrik Sugapa sebagai akibat belum adanya listrik membuat mereka kesulitan untuk beraktifitas.

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan.**

Berdasarkan temuan yang diperoleh dalam penelitian ini dapat disimpulkan :

1. Pemerintah Kabupaten Intan Jaya Distrik Sugapa walaupun telah melakukan pembagian dana sebagai upaya untuk memberdayakan masyarakat namun dalam hal pengawasan terkait penggunaan dana yang dibagi masih lemah. Akibatnya banyak dana yang dibagikan ternyata salah dalam penggunaannya.
2. Hambatan dalam realisasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya distrik Sugapa datang dari internal maupun eksternal. Diantaranya peran pemerintah, birokrasi maupun dari masyarakat itu sendiri.

#### **Saran**

1. Perlu adanya pengawasan yang baik dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Intan Jaya Distrik Sugapa agar target yang hendak dicapai dapat terwujud. Hal itu penting karena masyarakat di wilayah ini masih memerlukan pendampingan yang intensif agar dapat diberdayakan.
2. Perlunya peningkatan sarana-sarana pendukung lainnya agar masyarakat dapat meningkatkan usaha-usaha mereka agar dapat lebih berdaya.

### **DAFTAR PUSTAKA.**

- Ambar Teguh Sulistiyani, (2004) Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Gava Media Yogyakarta.
- Arbit Sanit,(2010b). Sistim Politik Indonesia: Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembanguna, PT. Raja Grafindo: Raja Wali Pers.
- Edi Shuarto, (2009) Kemiskinan Dan Perlindungan Sosial Di Indonesia,(menggagas model jaminan universal Bidang Kesehatan) Penerbit Alfabeta Bandung.
- Budiardjo Miriam, Ibrahim Ambong, ( 1993) Fungsi Legislatif Dalam Sistim Politik Indonesia, Penebit Raja Grafindo Persada Jakarta.
- H.Djoko Sudantoko, (2013) Dilema Otonomi Daerah, Penerbit Andi Yogyakarta.

- Estingsih Muji, (2005) Fungsi Pengawasan DPRD (Tinjauan Kritis Pengelolaan Keuangan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa) Penerbit Universitas Atmajaya:Yogyakarta.
- Rochajat Harun,(2006) Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar, Penerbit CV Mandar Maju.
- Indra Maipita, (2014) Mengukur Kemiskinan dan Distribusi Pendapatan, Penerbit UUP STIM YKPN Yogyakarta.
- Yanuar Ikbar,(2012) Metode Penelitian Sosial Kualitatif(panduan membuat tugas akhir/karya ilmiah). Penerbit Refika aditama Bandung.Makmur,(2011) Efektifitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan:, Refika Aditama Bandung.
- Samodera Wibawa,( 2011) politik Perumusan Kebijakan Publik, Graha Ilmu Yogyakarta-Pertama.
- Sarundjang.S. Harojajaang (2011) Arus Balik Kekuasaan Pusat Ke Daerah: Kata Hasta Pusta Jakarta.
- Rudy Badrudin (2012) Ekonomika Otonomi Daerah, UUP STIM YKPN Yogyakarta.
- Adam. I. Indrawijaya,(2010) Teori Prilaku Dan Budaya Organisasi, PT.Refika Aditama Bandung.
- Mardiasmo,(2002), Pengawasan pengendalian Pemeriksaan kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, ANDI Yogyakarta.
- Dunn.I.William (2003) Analisis Kebijakan Publik, PT:Hananidita Graha Widya.